KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR Sahkan Pimpinan MPR 10 Orang
Tanggal : Selasa, 17 September 2019
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 6

DPR Sahkan Pimpinan MPR 10 Orang

[JAKARTA] Rapat paripurna tahun sidang 2019-2020 DPR mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR/DPRD, dan DPD (MD3) yang mengatur penambahan jumlah pimpinan MPR RI dari 8 orang menjadi 10 orang.

Pengesahan di rapat paripurna itu didahului dengan paparan Wakil Badan Legislasi DPR Totok Daryanto. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin sidang lalu melaksanakan pengesahan.

"Apakah bisa kita sepakati revisi UU MD3 untuk diambil keputusan di sidang terhormat ini? Apakah revisi UU MD3 bisa disepakati menjadi UU?" tanya Fahri di ruang Rapat Paripurna, Senin (16/9).

"Setuju," jawab seluruh anggota.

Fahri lalu mengetuk palu sidang tanda keputusan sudah diambil. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang mewakili pemerintah di rapat itu, dalam sambutannya mengatakan alasan revisi UU tersebut yakni demi terwujudnya keseimbangan politik.

"Perubahan yang dimaksud untuk sesuai sila keempat untuk menjaga keseimbangan dan konstitusi guna memperkuat sistem politik yang demokratis," kata Tjahjo.

Mewakil presiden, Mendagri melaporkan pihaknya telah bersama-sama DPR untuk melakukan pembahasan tentang perubahan UU itu. Pihaknya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPR, khususnya Badan Legislasi atas persetujuan dan pandangannya.

"Sehingga bisa mencapai persetujuan bersama," tambahnya.

Keterwakilan

Sebelumnya, Tjahjo mengatakan, penambahan pimpinan MPR itu semata-mata menunjukkan bahwa MPR adalah lembaga permusyawaratan.

"Bentuk keterwakilan setiap fraksi dan kelompok anggota MPR yaitu DPD sebagaimana hasil Pemilu 2009," kata Tjahjo, Senin (16/9).

Anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD. Pada periode 2019-2024, terdapat sembilan partai politik yang lolos parlemen yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, Partai Demokrat, PAN, dan PPP. Masing-masing partai tersebut memiliki fraksi di DPR dan MPR.

Satu unsur pimpinan MPR lainnya nanti berasal dari unsur anggota DPD. Tjahjo menyatakan, keterwakilan seluruh fraksi dan DPD diharapkan dapat memudahkan pengambilan keputusan terkait kebijakan politik ketatanegaraan.

"Harapannya tentu lahir musyawarah mufakat sebagaimana amanat konstitusi. Semua punya komitmen yang sama membangun sistem pemerintahan presidensial yang lebih efektif dan efisien," demikian mantan ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR tersebut. [MJS/C-6]